

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024

Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan			Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target RPD pada akhir periode (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan/Evaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 (FISUWILAN II)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD (2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s/d Tahun 2024		Perangkat Daerah	Predikat Kinerja Tahun 2024
							Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	17	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						66.008.375.530	21.659.426.756	20.915.340.176		7.372.804.965	18.648.089.283	118,91	89,16	18.648.089.283	145,38	28,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				MELAMPAUI	
	2.13	HIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						66.008.375.530	21.659.426.756	20.915.340.176		7.372.804.965	18.648.089.283	118,91	89,16	18.648.089.283	145,38	28,25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
Sasaran 14 : Meningkatkan Akuntabilitas Politik dan Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui penerapan SPBE	2.13.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						38.908.375.530	12.459.426.756	11.291.521.261		4.702.593.874	9.856.042.992	87,29		9.856.042.992		25,33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
						Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB		BB	BB		A		A	112,5		A		112,5			Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.02	Program : Penataan Desa						2.700.000.000	1.100.000.000	60.160.000		30.244.500	47.675.000	79,25		47.675.000		1,77	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
						Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Persen	20	30	30		24,02	30		100	30		150				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.03	Program : Peningkatan Kerja Sama Desa						5.150.000.000	1.550.000.000	4.264.403.315		1.946.388.991	4.224.297.283	99,06		4.224.297.283		82,03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
						Persentase kerjasama desa yang difasilitasi	Persen	11,48	5	5		2,78	5		100	5		43,55				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Persentase pembangunan kawasan perdesaan	Persen	2	2	2		2	2		100	2		100				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.04	Program : Administrasi Pemerintahan Desa						12.650.000.000	4.350.000.000	1.774.470.600		494.441.000	1.397.661.600	78,76		1.397.661.600		11,05	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
						Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	50	50	50		2,5	143,33		286,66	143,33		286,66				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI	
						Persentase desa tertib administrasi	Persen	30	40	40		10	60		150	60		200				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI	
						Persentase pembinaan BUM Desa	Persen	20	40	40		10	40		100	40		200				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Persentase penertiban aset desa	Persen	20	50	50		10	60		120	60		300				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI	
						Persentase kepala desa yang dibina	Persen	30	40	40		0	40		100	40		133,33				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Persentase aparatur desa yang dibina	Persen	30	45	45		0	60		133,33	60		200				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	MELAMPAUI	
Sasaran 16 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2.13.05	Program : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat						6.600.000.000	2.200.000.000	3.524.785.000		199.136.600	3.122.412.408	88,58		3.122.412.408		47,31	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
						Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Persen	100	100	100		0	100		100	100		100				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Persen	100	100	100		50	100		100	100		100				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Persentase LSM aktif	Persen	100	100	100		0	100		100	100		100				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Persentase PKK aktif	Persen	100	100	100		50	100		100	100		100				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Persentase Posyandu aktif	Persen	100	100	100		50	100		100	100		100				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
						Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Persen	5	5	5		0	5		100	5		100				Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SANGAT TINGGI	
Rata-rata capaian kinerja RKPD (%)		100%																						
Predikat kinerja		MELAMPAUI																						
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:		1. Pencapaian target kinerja dilakukan pada indikator yang mendukung capaian program perangkat daerah; 2. Pagi anggaran dilakukan pada kegiatan yang mendukung capaian program; 3. Pelaksanaan kegiatan, seluruhnya dilakukan pada kegiatan, subkegiatan yang mendukung capaian kinerja prioritas Perangkat Daerah;																						
Faktor penghambat pencapaian kinerja:		1. SDM pelaksanaan kegiatan masih kurang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas/kompetensi; 2. Pagi anggaran masih belum optimal; 3. waktu pelaksanaan kegiatan belum sesuai rencana; 4. memantapkan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan jasa publik tergas;																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		2. melakukan pengesahan anggaran atau menambah pagi anggaran di perluasan; 3. mempermudah realisasi pelaksanaan kegiatan, agar capaian target dapat dilaksanakan;																						
Tidak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:		1. yang dilakukan pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian kinerja program perangkat daerah; 2. lebih memantapkan perencanaan dan anggaran kegiatan dibantu perencanaan mendasar; 3. menyediakan kebutuhan sdm yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja;																						